

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

1. Konsep Pemerintahan

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut..

Sedangkan menurut syafie (2014 : 12) pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuat (eksekusi)atau tidak melakukan sesuatu (*not tu do*) dalam mengoordinasikan , memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara depertemen dan unit dalam pemerintahan itu sendiri.

Munaf (2016:47) mengatakan pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigm baru pemerintahan dipandang memiliki objek material masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan /Negara.

Ermaya (1998:6-7) membedakan secara tajam secara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada hakekatnya adalah aspek statis, sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamika.

2. Konsep Evaluasi

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemebrian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*) kata-kata yang menyatakan usaha unntuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran dalam hal ini dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas (William N Dunn, 2000:21)

Menurut Bryant dan White dalam Mudrajat Kuncoro (1997:15), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata evaluasi berarti penilaian hasil.

Anderson (dalam Arikunto Suharsimi, 2000:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam (dalam Arikunto Suharsimi, 2000:1), mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Patton dan Sawicki (1991:25) mengklasifikasikan metoda pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian evaluasi menjadi 6 (enam) yaitu :

- a. Before and after comparisons, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya suatu kebijakan atau program di implementasikan .
- b. With and without comparisons, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan menggunakan perbandingan kondisi antara yang tidak mendapat dan yang mendapat kebijakan atau program, yang telah dimodifikasi dengan memasukan perbandingan kriteria-kriteria yang relevan ditempat kejadian peristiwa (TKP) dengan program terhadap suatu TKP tanpa program.

- c. Actual versus planed performance comparisons, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (actual) dengan ketetapan-ketetapan perencanaan yang ada (planned).
- d. Experimental (controlled) models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkontrol/dikendalikan untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
- e. Quasi experimental models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/ pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
- f. Cost oriented models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang hanya didasarkan dengan penelitian biaya terhadap suatu rencana.

Fungsi utama evaluasi, pertama memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakannya, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan public. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai juga kritik menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju yang dapat menganalisis alternatif sumber nilai (misalnya kepentingan kelompok) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (misalnya teknis, ekonomis, legal, social, substantif)

Riant D Nugroho (2004:185) mengatakan bahwa evaluasi akan memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik.

Menurut Muslimin Amarah (2000:12) program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila “program” dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang..

Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat unsur penting, yaitu :

- a. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan
- b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselsaikan dalam waktu sinngkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program berlangsung dalam kurun waktu relatif lama.pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yag artinya harus melibatkan sekelompok orang.

Selajutnya Nana Sudjana (2006:68) berpendapat bahwa tujuan evaluasi adalah untuk mealyani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang di perluka untuk pengambilan keptusan secara bijaksana. Oleh karenanya evaluasi program dapat menyajikan 5 (lima) jenis informasi dasar sebagai berikut:

- a. Berbagaidata dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu program harus dilanjutkan.
- b. Indicator-indikaro tentang program-program yang paling berhasil berdasarkan jumlah biaya yang digunakan.
- c. Informasi tentang unsur-unsur program dan gabungan antar unsur program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga efiesiensi pelaksanan program dapat tercapai.
- d. Informasi untuk berbagai karakterisitik suatu program-program pendidikan sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentanng individu, kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh dari pelayanan setiap program.
- e. Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dengan evaluasi pengaruh program.

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku konsep administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupaan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Taliziduhu Ndraha, 2000:23). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelsaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (William N Dunn, 2000:608).

Berkaitan dengan definisi evaluasi kebijakan terdapat indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn, yaitu :

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Perataan
- e. Responsivitas
- f. Ketetapan (William N Dunn, 2000:610)

1. Efektivitas

Menurut Budi Winarno (2002:184) Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, apabila pencapaian tujuan-tujuan dari pada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya.

2. Efisiensi

Menurut Budi Winarno (2002:185). Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi Budi Winarno (2002:186).

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

4. Perataan

perataan dalam kebijakan public dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public. Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencangkupi apabila biaya manfaat merata (Budi Winarno 2002:187).

5. Responsivitas

responsivitas dalam kebijakan public dapat diartikan sebagai dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan public atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan (Budi Winarno 2002:189)

6. Ketepatan

ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantive, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan tujuan tersebut (Budi Winarno 2002:184).

Selanjutnya menurut siagian (dalam Zulkifli, 2004:263) factor-faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut adalah:

1. Terciptanya sasaran yang ditetapkan untuk dicapai;
2. Tersedianya dana, sasaran dan prasarana yang diperlukan;
3. Pengetahuan dan keterampilan manajerial yang mutakhir, tidak ketinggalan zaman sesuai dengan tuntutan lingkungan eksternal;
4. Keunggulan produk organisasi sehingga para pesaing tersebut dapat menandingkannya ;
5. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja yang tinggi dari para pelaksana berbagai pelaksanaan kegiatan operasional;
6. Interaksi positif antara berbagai bantuan kerja yang membuahkan kerja sama yang intim dan serasi;
7. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan, misi, sasaran jangka panjang dan strategi induk organisasi;
8. Dalam pada itu harus diwaspadai pula kemungkinan yang diraihnya keberhasilan semua dan arti bahwa keberhasilan yang diraih itu hanya karena sasaran dan standar mutu

kerjakan yang ditentukan terlalu rendah, sehingga tanpa upaya maksimal, keberhasilan pun akan dicapai juga.

Evaluasi (penilaian) didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai (siagian 2003 : 117)

1. Input (masukan)
2. Proses
3. Output (keluaran)
4. Outcome (dampak)

3. Konsep Kebijakan

Kebijakan menurut Ndraha (2003 ;498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak Young & Quinn, (dalam Suharto, 2005 ;44).

Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa susunan peraturan prundang-undangan ataupun dalam bentuk program kebijakan untuk mengatur suatu hal yang dianggap dapat mendorong proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, 2005:7 Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)

Kebijakan yang telah dipilih oleh perencana kebijakan belum tentu berhasil di dalam implementasi, karena penerapan kebijakan dipengaruhi berbagai faktor. Menurut Subarsono (2008 ;87 dalam buku berbagai sistem politik), kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan

pemerintah. Badan-badan pemerintah tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut pendapat G.C Edwards III (dalam Subarsono, 2008 ;90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel :

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh sekelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran

b. Sumberdaya

Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif

yang berada dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*standard operating procedure*) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

4. Konsep Pelaksanaan Tugas

Siagian (2005; 126) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kemudian Moekizat (1998; 12) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap – tiap pegawai atau kelompok pegawai.

Menurut Lowler dan Porter dalam As'ad (2001; 47) menjelaskan, bahwa:

- a. Pelaksanaan tugas adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pelayanan yang bersangkutan;

- b. Pelaksanaan tugas adalah suatu yang berkenaan dengan apa yang dihasilkan seseorang dari tingkah laku kerjanya.

Berdasarkan beberapa pemaparan mengenai makna pelaksanaan tugas diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas memberikan gambaran bagaimana tugas yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan sebaik-bainya atau tidak.

Menurut Moekijat (1998;11), Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap

Raharjo adisasmita (1990: 58) mengataka bahwa sumber daya pelaksanaan yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap dan prilaku.

5. Konsep Manajemen Pemerintahan

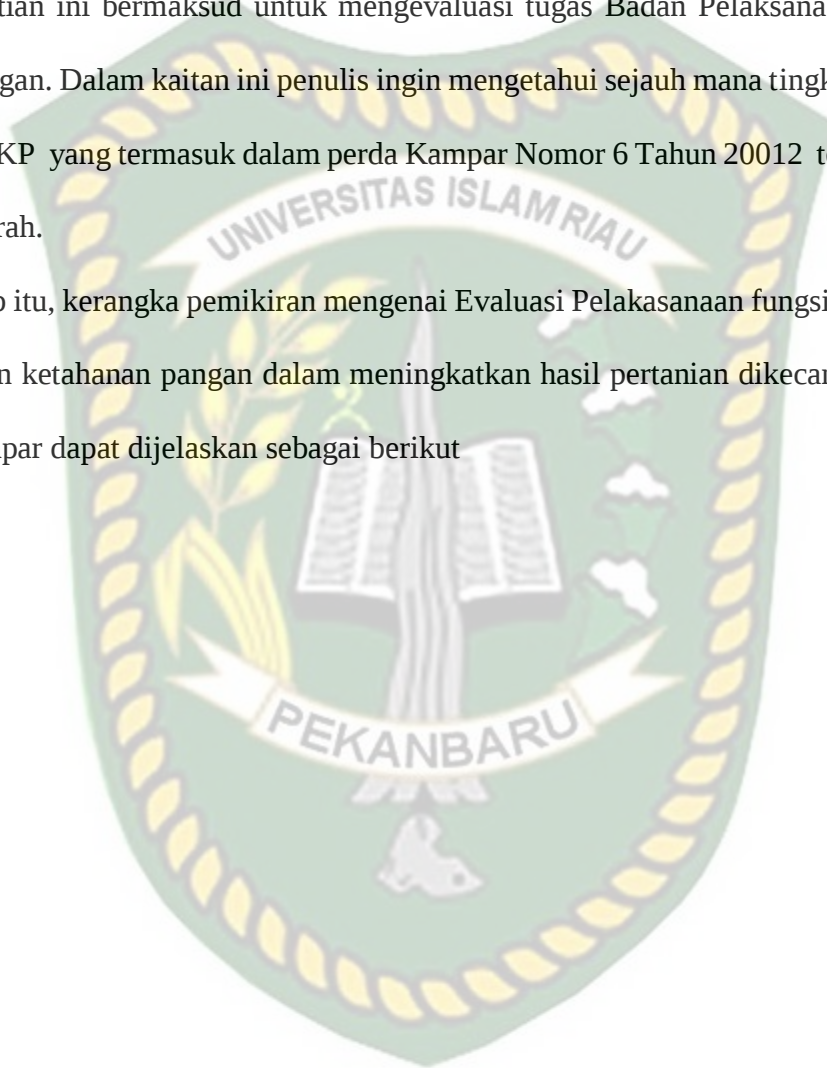
Menurut milat (dalam siswanto. 1998:02) mengatakan bahwa manajemen adalah sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah di organisasi dalam kelompok-kelompok formal untuk mencapai tujuan yang diiharapkan.

Sedangkan menurut sanusi (dalam Siswanto 1998: 03) manajemen adalah merupakan suatu sistem perilaku manusia yang koperatif yang di pimpin secara merupakan tindakan yang rasional.

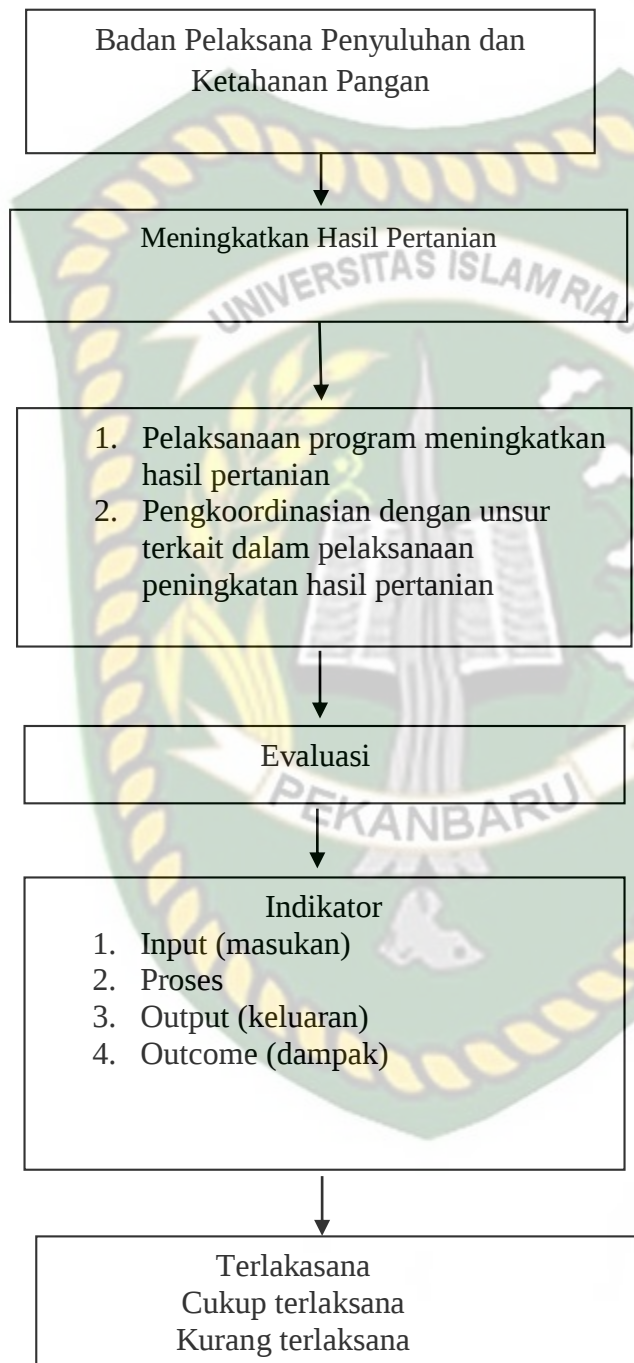
B. Karangka Pikir

Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan tentang keterkaitan antara konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan variable penelitian beserta indikator-indikator terkait. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwan penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan. Dalam kaitan ini penulis ingin mengetahui sejauh mana tingkat keterlaksanaan tugas dari BPPKP yang termasuk dalam perda Kampar Nomor 6 Tahun 20012 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Oleh sebab itu, kerangka pemikiran mengenai Evaluasi Pelakasanaan fungsi Badan Pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan dalam meningkatkan hasil pertanian dikecamtan tapung hillir kabupaten kampar dapat dijelaskan sebagai berikut



Gambar II.1 : Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian Di Kecamatan Tapung Hillir Kabupaten Kampar



C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas serta dihubungkan dengan landasan teori yang ada maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut “ Diduga Pelaksanaan Fugsi Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian Di Kecamatan Tapung Hillir Kabupaten Kampar belum efektif dan efisien;,”

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman maka berikut ini adalah penjelasan

1. Evaluasi adalah penilaian secara sistematis untuk menentukan atau menilai kegunaan, keefektifan sesuatu yang didasarkan pada kriteria tertentu dari program.
2. Fungsi adalah sekumpulan perintah atau target sebuah program yang dapat berupa nilai ataupun sebuah hasil program
3. BPPKP adalah badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan.
4. BPP adalah Badan Penyuluhan Pertanian
5. Meningkatkan adalah upaya yang dilakukan untuk menaikkan, memper tinggi suatu hasil
6. Tani adalah mata pencarian dalam bentuk bercocok tanam
7. Petani adalah orang yang melakukan bercocok tanam
8. Pertanian adalah hasil dari yang diambil dari alam atau dari bercocok tanam
9. Input (keluaran) adalah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar atau fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan program.
10. Proses adalah serangkaian cara yang digunakan untuk mencapai sasaran
11. Output (pengeluaran) adalah hasil yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat dari program yang telah dibuat

12. Outcome (dampak) adalah dampak yang diterima oleh masyarakat yang menerima program tersebut, baik positif maupun negative.

E. Oprasional Variable

Oprasional variable penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan fungsi badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan dalam meningkatkan hasil pertanian di kecamatan tapung hillir kabupaten kampar. Adapun penjabaran variable-variable tersebut kedalam oprasionalisasi variable dapat diliha pada table berikut ini



Table II. 2 : Konsep Oprasional Dan Oprasional Variable

Konsep Oprasional	Variable	Indikator	Item penilaian	Katagori ukuran
1	2	3	5	6
Evaluasi (penilaian) didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai (siagian 2003 : 117)	Evaluasi	1. Input (masukan) 2. Proses 3. Output (keluaran) 4. Outcome (dampak)	1. Perencanaan program 2. Pengembangan kelompok tani 3. Kecukupan SDM 1. Penyuluhan 2. Peningkatan kualitas petani 3. Monitoring dan evaluasi 1. Pemanfaatan 2. Membuka lapangan kerja 1. Mengurangi kemiskinan 2. Mengurangi kerugian petani	Terleksana Cukup terleksana Kurang terleksana Terleksana Cukup terleksana Kurang terleksana Terleksana Cukup terleksana Kurang terleksana Terleksana Cukup terleksana Kurang terleksana

Sumber : Olahan Data Tahun 2017

F. Teknik Pengukuran

Adapun dalam melihat pelaksanaan fungsi Badan Pelakasana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian Di Kecamatan Tapung Hillir Kabupaten

Kampar dalam penelitian ini akan dilakukan pengukuran terhadap variable penelitian dan pengukuran terhadap seluruh indicator variable penelitian adalah sebagai berikut:

Terlasana : Apabila keseluruhan dari jumlah responden menjawab indikator baik (67-100%)

Cukup terlasana : Apabila keseluruhan dari jumlah responden memberikan jawaban cukup baik (34-67%)

Kurang terlaksana : Apabila keseluruhan dari jumlah responden memberikan jawaban kurang baik (1-33%)

Adapun pengukuran indikator adalah sebagai berikut :

1. Input (masukan)

Terlasana : Apabila keseluruhan dari jumlah responden menjawab indikator baik (67-100%)

Cukup terlasana : Apabila keseluruhan dari jumlah responden memberikan jawaban cukup baik (34-67%)

Kurang terlaksana : Apabila keseluruhan dari jumlah responden memberikan jawaban kurang baik (1-33%)

2. proses

Terlasana : Apabila keseluruhan dari jumlah responden memberikan jawaban baik (67-100%)

Cukup terlaksana : Apabila keseluruhan dari jumlah responden memberikan jawaban cukup baik (34-67%)

Kurang terlaksana : Apabila keseluruhan dari jumlah responden memberikan jawaban kurang baik (1-33%)

3. Output (keluaran)

Terlasana :Apabila keseluruhan dari jumlah responden menjawab indiator baik (67-100%)

Cukup terlaksana : Apabila keseluruhan dari jumlah respomden memberikan jawaban cukup baik (34-67%)

Kurang terlaksana : Apabila keseluruhan dari jumlah responden memberikan jawaban kurang baik (1-33%)

4. Outcame (dampak)

Terlasana :Apabila keseluruhan dari jumlah responden menjawab indiator baik (67-100%)

Cukup terlaksana : Apabila keseluruhan dari jumlah respomden memberikan jawaban cukup baik (34-67%)

Kurang terlaksana : Apabila keseluruhan dari jumlah responden memberikan jawaban kurang baik (1-33%)